

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Konsep Pendidikan

1. Pengertian Pendidikan

Pendidikan dalam bahasa Yunani berasal dari kata pedagogik yaitu ilmu menuntun anak. Orang Romawi melihat pendidikan sebagai *educare*, yaitu mengeluarkan dan menuntun, tindakan merealisasikan potensi anak yang dibawa waktu dilahirkan di dunia. Bangsa Jerman melihat pendidikan sebagai *Erziehung* yang setara dengan *educare*, yakni: membangkitkan kekuatan terpendam atau mengaktifkan kekuatan atau potensi anak. Dalam bahasa Jawa, pendidikan berarti *panggulawentah* (pengolahan), mengolah, mengubah kejiwaan, mematangkan perasaan, pikiran, kemauan dan watak, mengubah kepribadian sang anak.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pendidikan berasal dari kata dasar didik (mendidik), yaitu: memelihara dan memberi latihan (ajaran, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan pendidikan mempunyai pengertian: proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan, cara mendidik.

Ki Hadjar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat

memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya.¹

Kajian dan pemikiran tentang pendidikan, terlebih dahulu perlu di ketahui dua istilah yang hampir sama bentuknya dan sering di digunakan dalam dunia pendidikan, yaitu pedagogi dan pedagoik. Pedagogi berarti “pendidikan” sedangkan pedagoik artinya “ilmu pendidikan”. Kata pedagogos yang pada awalnya berarti pelayanan kemudian berubah menjadi pekerjaan mulia. Karena pengertian pedagogi (dari *pedagogos*) berarti seorang yang tugasnya membimbing anak di dalam pertumbuhannya ke daerah berdiri sendiri dan bertanggung jawab. Pekerjaan mendidik mencakup banyak hal yaitu: segala sesuatu yang berhubungan dengan perkembangan manusia. Mulai dari perkembangan fisik, kesehatan, keterampilan, pikiran, perasaan, kemauan, sosial, sampai pada perkembangan iman.²

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menjelaskan bahwa pendidikan sebagai usaha sadar untuk mempersiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan bagi peranannya dimasa yang akan datang. Konsep pendidikan tersebut yang memerlukan ilmu dan seni ialah proses atau upaya sadar antar manusia dengan sesama secara beradab, dimana pihak kesatu secara terarah membimbing perkembangan kemampuan dan

¹Nurkholis, Pendidikan dalam Upaya Memajukan Teknologi, *Jurnal Kependidikan*, 1 (1), 2018, h. 24

²Abd Rahman BP, dkk, Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan, dan Unsur-Unsur Pendidikan, *Jurnal Al Urwatul Utsqo*, 2 (1), 2022, h. 2

kepribadian pihak kedua secara manusiawi yaitu orang perorang. Atau bisa diperluas menjadi makro sebagai upaya sadar manusia dimana warga masyarakat yang lebih dewasa dan berbudaya membantu pihak-pihak yang kurang mampu dan kurang dewasa agar bersama-sama mencapai taraf kemampuan dan kedewasaan yang lebih baik.³

Adapun pengertian pendidikan dari beberapa tokoh pendidikan Indonesia adalah sebagai berikut:

- a) Ki Hadjar Dewantara, menurutnya pendidikan adalah usaha kebudayaan yang bermaksud memberikan bimbingan dalam hidup tumbuhnya jiwa raga anak didik agar dalam garis-garis kodrat pribadinya serta pengaruh-pengaruh lingkungan, mendapat kemajuan hidup lahir batin. Kebudayaan adalah buah budi manusia sebagai hasil perjuangannya terhadap pengaruh alam dan jaman atau kodrat dan masyarakat. Budi adalah jiwa yang sudah matang, sudah cerdas, oleh karena itu dengan kebudayaan, budi manusia dapat mencapai 2 sifat istimewa yaitu luhur dan halus.⁴
- b) KH. Ahmad Dahlan, mengatakan bahwa pendidikan hendaknya diarahkan pada usaha membentuk manusia muslim yang berbudi pekerti luhur, alim dalam agama, luas pandangan dan paham masalah ilmu keduniaan, serta bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakatnya. tujuan pendidikan yang sempurna adalah melahirkan

³Uu Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003

⁴Henricus Suparlan, Filsafat Pendidikan Ki Hadjar Dewantara Dan Sumbangannya Bagi Pendidikan Indonesia, *Jurnal Fislafat*, 25 (1), 2015, h. 62

individu yang utuh menguasai ilmu agama dan ilmu umum, material dan spritual serta dunia dan akhirat.⁵

- c) KH. Hasyim Asy'ari, mengemukakan bahwa merupakan ibadah untuk mencari ridha Allah,yang mengantarkan manusia untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Karenanya belajar harus diniatkan untuk mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai Islam.Bukan hanya untuk sekedar menghilangkan kebodohan. Pendidikan hendaknya mampu menghantarkan umat manusia menuju kemaslahatan, menujukebahagiaan dunia dan akhirat. Pendidikan hendaknya mampu mengembangkan sertamelestarikan nilai-nilai kebajikan dan norma-norma Islam kepada generasi penerus umat,dan penerus bangsa.⁶

Penjelasan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam proses pengubahan sikap dan tata laku untuk mendewasakan manusia mencapai akhlakul karimah/berbudi pekerti melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan. Dalam pengertian yang sederhana dan umum makna pendidikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan

⁵Kemdikbud, <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/mkn/ahmad-dahlan-dalam-pemikirannya-mengenai-pendidikan-islam-di-indonesia/>, diakses pada 3 Mei 2023

⁶Zainur Rosyid, Dkk, Konsep Pengajaran Islam Menurut K.H. Hasyim Asy'ari, *Jurnal Pendidikan Islam*, 5 (1), 2022, h. 108

kebudayaan. Pendidikan dan budaya ada bersama dan saling memajukan.

Al-Qur'an berkali-kali menjelaskan pentingnya pengetahuan. Tanpa pengetahuan, niscaya kehidupan manusia akan menjadi sengsara. Al-Qur'an memperingatkan manusia agar mencari ilmu pengetahuan sebagaimana firman Allah dalam QS at-Taubah (9): 122 disebutkan:

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾

Artinya: Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya.⁷

Dari sini dapat dipahami bahwa betapa pentingnya pengetahuan bagi kelangsungan hidup manusia. Dengan pengetahuan, manusia akan mengetahui apa yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, yang membawa manfaat dan yang membawa keburukan. Tidak hanya itu, bahkan al-Qur'an memosisikan manusia yang memiliki pengetahuan pada derajat yang tinggi. Al-Qur'an surat al-Mujadalah/58: 11 menyebutkan:

⁷Q.S At-Taubah ayat 122

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ط
 وَإِذَا قِيلَ ائْتُوا فَانظُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ؕ
 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.⁸

Ayat tersebut menunjukkan bahwa orang yang beriman dan berilmu pengetahuan diangkat derajatnya oleh Allah Swt. beberapa derajat. Derajat yang dimaksudkan dapat bermakna kedudukan, kelebihan atau keutamaan dari makhluk lainnya, dan hanya Allah Swt. yang lebih mengetahuinya tentang bentuk dan jenisnya serta kepada siapa yang akan ditinggikan derajatnya.

Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai usaha pemberian informasi dan pembentukan keterampilan saja, namun diperluas sehingga mencakup usaha untuk mewujudkan keinginan, kebutuhan dan kemampuan individu sehingga tercapai pola hidup pribadi dan sosial yang memuaskan, pendidikan bukan semata-mata sebagai sarana untuk persiapan kehidupan yang akan datang, tetapi untuk kehidupan anak sekarang yang sedang mengalami perkembangan menuju ketinggian kedewasaannya. Pendidikan adalah proses pembelajaran yang didapat oleh setiap manusia (peserta didik) untuk dapat membuat manusia (peserta

⁸Q.S Al-Mujadalah ayat 11

didik) itu mengerti, paham, dan lebih dewasa serta mampu membuat manusia (peserta didik) lebih kritis dalam berpikir.

Pendidikan menjadi sangat bertaraf dalam kehidupan bangsa ini sehingga banyak para ahli berusaha menalar dan menyampaikan apa artian pendidikan yang sesungguhnya dalam kehidupan ini. Selain itu, pengertian pendidikan atau definisinya menurut para ahli pendidikan dunia yaitu:

- a) Prof. Dr. M.J Langeveld: Pendidikan ialah pemberian bimbingan dan bantuan rohani bagi yang masih memerlukannya.
- b) Prof. Zaharai Idris: Pendidikan ialah serangkaian kegiatan komunikasi yang bertujuan, antara manusia dewasa dengan si anak didik secara tatap muka atau dengan menggunakan media dalam rangka memberikan bantuan terhadap perkembangan anak seutuhnya.
- c) H. Horne: Pendidikan adalah proses yang di lakukan terus menerus dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada Tuhan, seperti termanifestasi dalam alam sekitar intelektual, emosional dan kemanusiaan dari manusia.
- d) Ahmad D. Marimba: Pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.⁹

Dapat diartikan bahwa pengertian pendidikan adalah kegiatan untuk saling berbicara mengenai wawasan yang diketahui guna menambah

⁹Abd Rahman BP, dkk, Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan, dan Unsur-Unsur Pendidikan..., h. 4

landasan didalam kehidupan. Landasan yang diterapkan dalam kehidupan berguna memperbaiki sistem kehidupan agar lebih tertata dan sesuai landasan agama.

2. Fungsi dan Tujuan Pendidikan

Fungsi dan tujuan pendidikan di Indonesia telah diatur didalam undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Di dalam undang-undang tersebut memuat segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan nasional di Indonesia yang meliputi dari pengertian pendidikan, fungsi dan tujuan pendidikan, jenis-jenis pendidikan, jenjang pendidikan, standar pendidikan dan lain sebagainya. Dengan demikian arah pendidikan di Indonesia sudah ditentukan dengan sedemikian rupa.

Mengacu pada undang-undang No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional fungsi pendidikan yaitu Pasal 3 yang menyatakan bahwa "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Fungsi pendidikan adalah menghilangkan segala sumber penderitaan rakyat dari kebodohan dan ketertinggalan serta fungsi pendidikan Indonesia menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari fungsi yang diuraikan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan nasional Indonesia lebih mengedepankan akan pembangunan sikap, karakter, dan transformasi nilai-nilai filosofis negara Indonesia. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme serta mampu bersaing di kancah internasional.¹⁰

Tujuan pendidikan nasional Indonesia sesuai dengan undang-undang No. 20 tahun 2003 yaitu, Pendidikan diupayakan dengan berawal dari manusia apa adanya (aktualisasi) dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang apa adanya (potensialitas), dan diarahkan menuju terwujudnya manusia yang seharusnya atau manusia yang dicita-citakan (idealitas). Tujuan pendidikan itu tiada lain adalah manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, cerdas, berperasaan, berkemauan, dan mampu berkarya; mampu memenuhi berbagai kebutuhan secara wajar, mampu mengendalikan hawa nafsunya; berkepribadian, bermasyarakat dan berbudaya. Implikasinya, pendidikan harus berfungsi untuk mewujudkan (mengembangkan) berbagai potensi yang ada pada manusia dalam konteks dimensi keberagaman, moralitas, moralitas, individualitas/personalitas, sosialitas dan keberbudayaan secara menyeluruh dan terintegrasi. Dengan kata lain, pendidikan berfungsi untuk memanusiakan manusia.

¹⁰I Wayan Cong Sujana, *Fungsi Dan Tujuan Pendidikan Indonesia*, Jurnal Pendidikan Dasar, 4(1), 2019, h.31.

Tujuan Pendidikan Nasional, sesuai dengan Tap MPRS No. XXVI/MPRS/1966 tentang Agama, pendidikan dan kebudayaan, maka dirumuskan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan pembukaan UUD 1945. Selanjutnya dalam UU No. 2 tahun 1989 ditegaskan lagi bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan YME dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.¹¹

Dengan demikian, pendidikan Indonesia lebih cenderung mengutamakan pembangunan sikap sosial dan religius dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan Pancasila sila kesatu yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, didakan sila tersebut menunjukan bahwa Indonesia sangat mengedepakan sikap spiritual dan pengakuan terhadap keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga tidaklah diragukan bahwa negara Indonesia dapat dikatakan negara yang paling religius setelah negara Pakistan.

3. Kurikulum Pendidikan.

Pada mulanya istilah kurikulum digunakan bukan dalam bidang pendidikan, akan tetapi dalam dunia olahraga. *Curriculum* dalam bahasa

¹¹UU RI nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Yunani berasal dari kata *curir*, artinya “pelari”, dan *curere*, artinya “tempat pacu” dari sebuah perlombaan yang telah dibentuk semacam rute pacuan dan harus dilalui oleh para kompetitor. Dengan kata lain, rute tersebut harus dipatuhi dan dilalui oleh para kompetitor sebuah perlombaan.

Kurikulum dapat diartikan secara sempit dan secara luas. Secara sempit kurikulum diartikan sejumlah mata pelajaran yang harus diikuti atau diambil siswa untuk dapat menamatkan pendidikannya pada lembaga tertentu, sedangkan secara luas kurikulum diartikan dengan semua pengalaman belajar yang diberikan sekolah kepada siswa selama mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu. Usaha-usaha untuk memberikan pengalaman belajar kepada siswa dapat berlangsung di dalam kelas maupun di luar kelas baik yang dirancang secara tertulis maupun tidak, asal ditujukan untuk membentuk lulusan yang berkualitas.¹²

Dengan demikian, kurikulum dapat diartikan suatu komponen yang sangat penting dan menentukan penyelenggaraan pendidikan. Kurikulum berfungsi sebagai alat untuk pencapaian tujuan pendidikan, Apabila tujuan pendidikan berubah maka secara otomatis kurikulum juga harus dirubah. Bagi peserta didik, kurikulum berguna sebagai alat untuk mengembangkan segenap potensi-potensi yang dimilikinya ke arah yang lebih baik di bawah bimbingan guru di sekolah. Dan bagi guru, kurikulum

¹²Hairunisa Jeflin dan Hade Afriansyah , Pengertian Kurikulum, Proses Administrasi Kurikulum dan Peran Guru dalam Administrasi Kurikulum, UNP: 2020, 2.

berfungsi sebagai pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan pembelajaran di sekolah.

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Bab I Pasal 1). Batasan yang terkandung dalam undang-undang tersebut mengartikan kurikulum sebagai suatu program atau rencana tertulis yang harus dijadikan dasar, patokan, atau standar bagi pengelolaan sistem pendidikan secara nasional. Ada dua unsur pokok yang menjadi tekanan dari pengertian kurikulum tersebut, yaitu:

- a) Isi kurikulum, adalah mata pelajaran (*subject matter*) yang diberikan pihak sekolah dan harus ditempuh oleh setiap siswa, dan
- b) Tujuan utama pendidikan atau kurikulum, agar siswa menguasai setiap mata pelajaran yang diberikan dan akhirnya siswa tersebut berhak untuk mendapatkan sertifikat atau ijazah sebagai bukti telah menyelesaikan program pendidikan.¹³

Secara garis besar dari beberapa pengertian kurikulum, dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis. Pertama, kurikulum sebagai program, rencana atau harapan, dan kedua, kurikulum sebagai pengalaman belajar,

¹³Dadang Sukirman dan Ali Nugraha, Sukirman, Hakikat Kurikulum. *Kurikulum dan bahan belajar TK (PGTK2403/M)*. Jakarta: Universitas Terbuka (2016), h. 1.5

hasil, atau kegiatan nyata yang dilaksanakan di sekolah. Kurikulum sebagai program disebut dengan kurikulum tertulis dan bersifat ideal.

Kurikulum secara ideal memuat rencana berbagai hal dalam sistem pendidikan, terutama mengenai tujuan atau kompetensi yang diharapkan, hasil belajar, batasan isi, kegiatan, sistem penilaian, dan pengelolaan lingkungan belajar. Semua itu dituangkan dalam garis-garis besar program pembelajaran (GBPP), silabus, skenario persiapan pembelajaran, dan bentuk-bentuk perencanaan lainnya. Sementara itu, kurikulum sebagai pengalaman belajar merupakan perwujudan dari kurikulum yang direncanakan disebut dengan kurikulum actual, yaitu kegiatan nyata pada saat terjadinya pembelajaran baik diselenggarakan di dalam maupun di luar kelas.

Dengan adanya beberapa pengertian kurikulum, kurikulum sebagai alat pendidikan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa fungsi, yaitu: kurikulum sebagai pengembangan proses kognitif anak, aktualisasi diri anak, rekonstruksi sosial, dan akademik.

a) Fungsi Kurikulum sebagai proses kognitif

sebagai proses kognitif Kurikulum dipandang sebagai alat untuk mengembangkan kemampuan intelektual anak, yaitu pengembangan kemampuan berpikir untuk menghadapi dan memecahkan permasalahan yang akan dihadapi.

b) Fungsi Kurikulum sebagai Proses Aktualisasi Diri

Sebagai proses aktualisasi diri anak, kurikulum merupakan alat untuk memfasilitasi anak agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi, minat, dan bakat yang dimilikinya sehingga setiap anak bisa mengenal terhadap dirinya sendiri dan tumbuh serta berkembang sebagai dirinya sendiri.

c) Fungsi Kurikulum sebagai proses Rekonstruksi Sosial

Sebagai proses rekonstruksi sosial, kurikulum dipandang sebagai alat untuk membekali anak dengan kemampuan agar menjadi anggota masyarakat yang tidak saja menerima atau menyesuaikan diri dengan “kehidupan” yang sudah ada, tetapi juga secara inovatif dan kreatif mengembangkan kehidupan ke arah yang lebih produktif dan berkualitas.

d) Fungsi Kurikulum sebagai Program Akademik

Sebagai program akademik, kurikulum dipandang sebagai alat dan tempat belajar, di mana dari kegiatan belajar yang diprogram kurikulum anak dapat memperoleh pengetahuan yang diharapkan dapat membekali kemampuan untuk bisa “hidup” dalam zaman yang dilaluinya.¹⁴

B. Pengembangan Kurikulum di Indonesia

Kurikulum menjadi bagian terpenting pendidikan. Searah dengan kemajuan pendidikan yang terus meningkat pada semua jenis dan jenjang

¹⁴Dadang Sukirman dan Ali Nugraha, Sukirman, Hakikat Kurikulum. *Kurikulum dan bahan belajar TK (PGTK2403/M)...*, h. 1.8

pendidikan di Indonesia. Secara resmi, kurikulum sejak zaman Belanda sudah diterapkan di sekolah, artinya kurikulum sudah diterapkan sejak saat penjajahan Belanda.¹⁵ Kurikulum selalu ada perubahan dan penyempurnaan karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Tujuan pendidikan dapat berubah secara menyeluruh jika negara tersebut sedang mengalami perubahan dari negara dijajah menjadi negara merdeka.¹⁶

Opini masyarakat “ganti menteri ganti kurikulum” namun kenyataannya bukan seperti itu. Kenyataannya perubahan kurikulum adalah bentuk sebagai pengaruh dari perubahan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional, misalnya seperti Rencana Pelajaran 1950 merupakan konsekuensi lahirnya UU Nomor 4 Tahun 1950 dan kurikulum 1994 merupakan konsekuensi dari lahirnya UU Nomor 2 Tahun 1989.

Kurikulum di Indonesia setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 telah mengalami 9 kali perubahan diantaranya adalah pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006 dan 2013.¹⁷ Berbeda dengan itu, Kemendikbud memaparkan tentang sejarah perkembangan kurikulum yaitu :

1. Kurikulum masa Orde Lama(1945-1965)

a) Kurikulum 1947 “Rentjana Pelajaran 1947”

Pada masa kemerdekaan muncul kurikulum yang namanya yaitu kurikulum 1947 istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda disebut “*leer plan*” artinya rencana pelajaran, dan istilah *curriculum* dalam

¹⁵Fitri Wahyuni, Kurikulum dari Masa Ke Masa, Jurnal, Al-Adabiya, 1 (2), Juli – Desember 2015.

¹⁶S. Nasution, Asas-asas Kurikulum, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2006), h. 251

¹⁷Arif Munandar, Pengantar kurikulum, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2012), h. 50.

bahasa Inggris kurang familiar dikalangan masyarakat. Sifat bersifat politisi adalah satu ciri kurikulum 1947 karena dari awalnya berkiblat pendidikan belanda yang durubah untuk kepentingan nasional. Dapat di pahami bahwa sistem pendidikan kolonial dikenal dengan sistem yang sangat diskriminatif. Sekolah-sekolah dibangun dengan membedakan layanan pendidikan bagi anak-anak Belanda, anak-anak timur asing dan anak pribumi. Golongan pribumi dibagi menjadi golongan strata sosial bawah dan priyai.¹⁸

Pelaksanaan kurikulum 1947 tidak menekankan pada aspek kognitif namun hanya mengutamakan pendidikan karakter seperti membangun rasa nasionalisme. Aspek selanjutnya yang menjadi tujuan utama dalam kurikulum Rentjana pelajaran 1947. Struktur program dalam Rentjana pelajaran 1947 dibagi menjadi dua bagian, yaitu struktur program menggunakan bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Adapun struktur mata pelajaran pada kurikulum Rentjana pelajaran 1947 bersifat terpisah-pisah atau dalam konteks kurikulum disebut dengan *separated curriculum*.¹⁹

Berikut ini ciri-ciri Kurikulum 1947:

- 1) Sifat kurikulum kurikulum mata pelajaran yang terpisah (1946-1947)
- 2) Penganar disekolah menggunakan

¹⁸Alhamuddin, Politik Kebijakan Pengembangan Kurikulum di Indonesia Sejak Zaman Kemerdekaan Hingga Reformasi 1947-2013, (Jakarta : Kencana, 2019), h. 46-47.

¹⁹Alhamuddin, Politik Kebijakan Pengembangan Kurikulum, h. 47-48

3) Dalam jenjang pendidikan memiliki jumlah mata pelajaran yang berbeda. Berdasarkan deskripsi diatas, dapat dipahami bahwa konsep kurikulum Rentjana pelajaran 1947 masih bersifat sederhana, yaitu hanya sebagai rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan atau di implementasikan dalam pembelajaran dikelas. Dengan demikian bahwa kurikulum belum mencakup seluruh pengalaman yang akan diperoleh peserta didik baik dalam kelas maupun luar kelas.²⁰

b) Kurikulum 1952, “Rentjana Pelajaran Terurai 1952”

Pada tahun 1952 dilakukan perbaikan pada kurikulum di Indonesia yang kemudian dikenal dengan kurikulum 1952. Kurikulum ini lebih memerinci setiap mata pelajaran yang kemudian di beri nama “Rentjana Pelajaran Terurai 1952” dan belum menggunakan istilah kurikulum. Kerangka kurikulum 1952 reatif sama dengan kurikulum 1947. Namun demikian, sistem pendidikan nasional sudah menjadi tujuan kurikulum ini. UU No. 4 tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah mempengaruhi munculnya kurikulum 1950 ini.

Bagaimana cara hidup yang baik sangat penting untuk di hubungkan dengan karakter yang menjadi pintu tujuan sebuah perbaikan kurikulum. Dan kehidupan nyata di masyarakat (tematik) menjadi hal yang paling menonjol dan sekaligus menjadi ciri khas

²⁰Dicky Wirianto, Perspektif Historis Transformasi Kurikulum di Indonesia, Jurnal, Islamic Studies Journal, Vol. 2 No. 1 Januari - Juni 2014.

kurikulum 1952 ini. Dalam konteks Rentjana Pelajaran Terurai 1952, mata pelajaran diklasifikasikan dalam lima kelompok bidang study, yaitu : 1) Moral, 2) Kecerdasan, 3) Emosionalistik / artistik 4) Keterampilan dan 5) Jasmani.²¹

c) Kurikulum 1964, “Rentjana Pendidikan 1964”

Kurikulum di Indonesia pada tahun 1964 mengalami penyempurnaan kembali. Konsep pembelajaran aktif, kreatif dan produktif menjadi isu-isu yang dikembangkan pada Rentjana Pendidikan 1964. Konsep tersebut mewajibkan setiap sekolah membimbing anak agar mampu memikirkan sendiri pemecahan pemecah masalah (*problem solving*) terhadap berbagai masalah yang ada. Dengan demikian dapat dipahami bahwa konsep kurikulum pada era ini lebih bersifat bagaimana peserta didik bersikap aktif, kreatif dan produktif menemukan solusi terhadap berbagai masalah yang berkembang dan ada di masyarakat.

Cara belajar yang digunakan kurikulum 1964 adalah sebuah metode yang disebut dengan gotong royong terpinpin. Selain itu, hari krida ditetapkan pada hari sabtu oleh pemerintah. Hari Krida artinya pada hari tersebut peserta didik diberikan kebebasan untuk berlatih berbagai kegiatan disesuaikan dengan minat dan bakat masing-masing. Seperti kegiatan kebudayaan, kesenian, olahraga dan berbagai bentuk permainan. Kurikulum 1964 direncana agar mampu menjadi alat untuk

²¹Alhamuddin, Politik Kebijakan Pengembangan Kurikulum, h. 48-49

mencetak manusia Indonesia Pancasila yang sosialis dengan sifat-sifat seperti yang termaktub dalam Tap MPRS No. II tahun 1960.²²

2. Kurikulum masa Orde Baru (1966-1998)

a) Kurikulum 1968

Sifat politis melekat erat pada awal munculnya kurikulum 1968, mengganti kurikulum 1964 yang dicitrakan sebagai hasil dari pemerintahan “Orde Lama”. Jika dilihat dari aspek tujuannya, upaya untuk meningkatkan rasa cinta tanah air, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan ketrampilan jasmani, moral, budi pekerti dan keyakinan beragama lebih di tekankan pada kurikulum 1968.

Perubahan dari pancawardana menjadi pembinaan jiwa pancasila terjadi pada kurikulum 1968. UUD 1945 menjadi kiblat dalam penerapan kurikulum ini secara murni dan konsekuen. Jumlah dari keseluruhan matapelajaran pada kurikulum 1968 berjumlah sembilan mata pelajaran. Pelajaran dikurikulum ini bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan nyata yang terjadi di lapangan.²³ Kelahiran kurikulum 1968 karena adanya pertimbangan politik ideologis yang dianut pemerintah saat itu, yaitu orde baru. *Correlated subject curriculum* menjadi ciri khas struktur kurikulum 1968, artinya bahwa materi pada jenjang

²²Alhamuddin, Politik Kebijakan Pengembangan Kurikulum, h. 49-50

²³Alhamuddin, Politik Kebijakan Pengembangan Kurikulum, h. 51-52

pendidikan rendah memiliki korelasi untuk jenjang pendidikan pada jenjang selanjutnya.

Kurikulum 1968 identik dengan muatan mata pelajaran teoritis, tidak berkaitan dengan ketentuan obyektif dilapangan atau kehidupan nyata (tematik) adapun metode pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum ini sangat tergantung oleh ilmu pendidikan dan psikologi pada akhir tahun 1960-an.

b) Kurikulum 1975

Pembangunan nasional melatarbelakangi kelahiran kurikulum 1975 akibat dari banyaknya perubahan-perubahan yang terjadi, terutama sejak tahun 1969. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi program maupun kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pembaharuan tersebut. Kurikulum 1975 merupakan kurikulum yang bersifat sentralistik atau dibuat oleh pemerintah pusat dan sekolah-sekolah hanya menjalankan. Kurikulum 1975 berprinsip tujuan dari pendidikan harus efektif dan efisien. Kurikulum 1975 banyak mendapatkan kritik dari pelaksana di lapangan. Guru dibuat sibuk menulis perincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran.²⁴

Kurikulum 1975 sebagai pengganti kurikulum 1968 memiliki beberapa prinsip pelaksanaan, diantaranya adalah sebagai berikut:

²⁴Alhamuddin, Politik Kebijakan Pengembangan Kurikulum, h. 53-54

- 1) Pendidikan harus berorientasi pada tujuan.
 - 2) Menggunakan pendekatan integratif dalam arti bahwa agar tujuan pembelajaran menjadi tujuan yang inyegratif
 - 3) Dalam daya dan waktu menekankan keefisien dan keefektifannya
 - 4) Menganut pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan (PPSI). Perubahan tingkah laku peserta didik menjadi tujuan utama dari kurikulum ini
 - 5) Stimulus dan respon yang dipengaruhi oleh psikologi tingkah laku. Karena tujuannya adalah perubahan tingkah laku maka teori pembelajaran yang digunakan adalah teori belajar behavioristic.²⁵
- c) Kurikulum 1984

Kurikulum merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975 dan menggunakan pendekatan proses. Dalam hal ini faktor tujuan tetap penting meskipun sudah menggunakan pendekatan proses. Kurikulum ini juga sering disebut "Kurikulum 1975 yang disempurnakan". Subjek belajarnya adalah siswa. Model seperti ini yang dinakan aktif learning karena siswa yang akan selalu aktif dalam pembelajaran. Dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Namun banyak sekolah yang

²⁵Alhamuddin, Politik Kebijakan Pengembangan Kurikulum, h. 54

menerapkan dengan baik dan alhasil siswa tidak melaksanakan pembelajaran dengan baik dan hanya gaduh di kelas.²⁶

d) Kurikulum 1994 (*Separate Subject Curriculum*)

Kurikulum 1975 dan kurikulum 1984 dipadukan menjadi kurikulum 1994. Kurikulum 1994 dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang no.2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada kurikulum ini terjadi perubahan dari sistem semester ke sistem catur wulan. Dengan sistem caturwulan yang pembagiannya dalam satu tahun menjadi tiga tahap diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran cukup banyak. Tujuan pengajaran kurikulum ini yaitu lebih berorientasi pada materi pelajaran dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah.

Tujuan dan proses kurang berhasil dipadukan. Muatan nasional dan muatan lokal sangat banyak porsinya. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat juga mendesak agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Akhirnya, Kurikulum 1994 menjadi kurikulum yang super padat dan hasilnya juga kurang bagus. Berdasarkan study dokumentasi yang telah dijelaskan dalam bukunya Hari Suderajat, kurikulum 1994 dapat

²⁶Alhamuddin, Sejarah Kurikulum Indonesia (Studi Analisis Kebijakan Pengembangan Kurikulum, Jurnal, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2014.

dikemukakan bahwa kurikulum tersebut mempunyai beberapa kekurangan dan kelebihan.²⁷

3. Kurikulum masa Reformasi (1999-sekarang)

a) Kurikulum 2004, “KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi)”

Kurikulum berbasis kompetensi (KBK) adalah suatu konsep pendekatan, strategi kurikulum yang menekankan pada penguasaan berbagai kompetensi tertentu. Peserta didik tidak hanya menguasai pengetahuan dan pemahaman, tetapi juga keterampilan, sikap, minat, motivasi dan nilai-nilai agar dapat melakukan sesuatu dengan penuh tanggung jawab.

Ciri-ciri kurikulum berbasis kompetensi

Depdiknas menjelaskan ciri-ciri kurikulum berbasis kompetensi yaitu:

- 1) Memperhatikan apa yang sah diperoleh siswa selama dilaksanakan KBM
- 2) Hasil akhir dari sebuah pembelajaran adalah anak mempunyai agama dan keterampilan
- 3) Metode pembelajarannya bermacam-macam
- 4) Sumber belajar tidak hanya mengandalkan guru namun dari segala sesuatu yang mengandung edukasi
- 5) Penilaian berdasarkan proses yang dilalui siswa dan hasilnya.²⁸

²⁷Hari Suderajat, Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), (Bandung : CV Cipta Cekas Grafika, 2004), h. 6

²⁸Zainal Arifin, Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum, (Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2011), h. 153

b) Kurikulum 2006, “KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan)”

Salah satu rujukan dalam pengembangan kurikulum di Indonesia adalah kurikulum KTSP. Pencapaian kompetensi adalah orientasi dari KTSP, maka dari itu KTSP sering di sebut dengan KBK yang disempurnakan. Unsur standar kompetensi dan kompetensi dasar yang melekat pada KBK serta adanya prinsip yang sama dalam pengelolaan kurikulum yakni yang disebut dengan Kurikulum Berbasis Sekolah (KBS).²⁹

KTSP mempunyai karakteristik yang sama dengan KBK yaitu guru bebas untuk melakukan perubahan, revisi dan penambahan dari standar yang sudah di buat pemerintah, mulai dari tujuan, visi-misi, struktur dan muatan kurikulum, beban belajar, kalender pendidikan sampai pengembangan silabus.

Badan standar Nasional Pendidikan (BSNP) telah membuat Standar Kompetensi dan kompetensi dasar, yang diturunkan dari Standar Kompetensi Lulusan (SKL), yang di jadikan rujukan harus dari kompetensi inti dan Standar kelulusan sedangkan yang menjadi prinsip pengembangan adalah KBS yang dirancang untuk memberdayakan daerah dan sekolah dalam merencanakan, melaksanakan dan mengelola serta menilai proses dan hasil pembelajaran sesuai dengan daerahnya masing-masing. KTSP lahir dari semangat dari daerah-daerah bahwasanya pendidikan tidak hanya menjadi tanggung

²⁹Wina Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran : Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2008), h. 127

jawab pemerintah pusat saja melainkan juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, oleh sebab itu dilihat dari pola atau model kurikulum pengembangannya KTSP merupakan salah satu model kurikulum bersifat desentralisasi.

Landasan Penyusunan Kurikulum KTSP

- 1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2) PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - 3) Permendikbud Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi
 - 4) Permendikbud Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan
 - 5) Permendikbud Nomor 24 Tahun 2006 dan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan 23 tahun 2006
 - 6) Permendiknas Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.³⁰
- c) Kurikulum 2013

Kurikulum KTSP dianggap belum sempurna dan masih banyak kekurangan, apalagi saat ini adalah era digital yang apa-apa bisa dilakukan dengan teknologi maka KTSP harus segera dirubah menjadi kurikulum 2013. Berkembangnya teknologi adalah salah satu alasan yang relevan untuk menyempurnakan sebuah kurikulum. Sejarah pergantian dan perubahan kurikulum tidak terlepas dari sejarah yang menaunginya.

³⁰Suparlan, *Tanya Jawab Pengembangan Kurikulum.....*, hlm. 99

Sejarah yang melatarbelakangi lahirnya kurikulum KTSP merupakan bentuk implementasi Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Substansi kurikulum ini adalah peraturan pemerintah No.19 tahun 2005 tapi isi dan arah pengembangan pembelajaran masih memiliki keberhasilan, karakteristik dalam paket kompetensi yang ada pada KTSP yang memiliki kesamaan juga dengan karakteristik kurikulum KBK.³¹

Berkaitan dengan pengembangan kurikulum, kurikulum 2013 lebih menekankan pada pendidikan karakter, dengan harapan melahirkan insan yang produktif, kreatif, inovatif dan berkarakter. Meningkatkan proses dan hasil belajar yang diarahkan kepada pembentukan budi pekerti dan peserta didik yang berakhlak mulia sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada setiap satuan pendidikan adalah tujuan pendidikan karakter pada kurikulum 2013. Kurikulum 2013 menekankan pengembangan kompetensi pengetahuan, ketrampilan, dan sikap anak didik secara holistik. Kompetensi pengetahuan, ketrampilan dan sikap ditentukan oleh rapor dan merupakan penentuan kenaikan kelas dan kelulusan anak didik.

Masing-masing kurikulum memiliki karakteristik tersendiri, demikian halnya dengan kurikulum 2013 yang dirancang oleh Pemerintah. Adapun kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut :

³¹Aslan, *Hidden Curriculum : E-booksia Publisher*, (Jakarta : CV Pena Indis, 2019), h. 169.

- 1) Mengembangkan secara seimbang antara kognitif, afektif dan psikomotor;
- 2) Siswa menerapkan apa yang sudah didapat di Sekolah dalam kehidupannya sehari-hari;
- 3) Mengembangkan afektif, kognitif dan psikomotorik serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat;
- 4) Memberi kesempatan yang banyak kepada siswa untuk mengembangkan aspek afektif, kognitif dan psikomotorik;
- 5) Kompetensi inti dijabarkan menjadi kompetensi dasar;
- 6) Kompetensi dasar yang diturunkan dari kompetensi inti harus sesuaian sinkron;
- 7) Kompetensi dasar dikembangkan didasrkan padaprinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar matapelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi horizontal dan vertikal).

C. Kurikulum Merdeka

1. Pengertian Kurikulum Merdeka

Secara etimologis, kurikulum merupakan serapan bahasa Inggris “*curriculum*” yang dinyatakan sebagai istilah berasal dari bahasa Latin, yakni *curro* atau *currere* dan *ula* atau *ulums* yang diartikan sebagai “*racecourse*”, yakni lapangan pacuan kuda, jarak tempuh untuk lomba lari, perlombaan, pacuan balapan, dan lain-lain.³² Adapun secara terminologis kurikulum memiliki banyak arti, diantaranya;

³²Abdul Wafi, Konsep Dasar Kurikulum Pendidikan Agama Islam, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1 (2), 2017, h.134

Menurut KBBI, kurikulum merupakan perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan; perangkat mata kuliah mengenai bidang keahlian khusus. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Adapun menurut Dakir yang dikutip oleh Abdul Wafi, pengertian kurikulum sebagai berikut:

a) Kurikulum sebagai rencana kegiatan belajar mengajar

Kurikulum diartikan sebagai *planning* tentang sejumlah bahan pelajaran yang disediakan oleh lembaga pendidikan untuk dipelajari oleh peserta didik dalam mengikuti pembelajaran disuatu lembaga. Rumusan pengertian seperti demikianpopulernya, sehingga kamus *Webster's New Internasional Dictionary*, yang sudah memasukkan pengertian kurikulum dalam bahasa Inggris sejak tahun 1953, memaknai kurikulum:

- 1) sebagai sejumlah perangkat pelajaran yang diterapkan untuk dipelajari oleh siswa di suatu lembaga atau perguruan tinggi, untuk memperoleh ijazah dan gelar keseluruhan perangkat mata pelajaran yang ditawarkan oleh suatu lembaga pendidikan atau suatu departement tertentu.
- 2) Kurikulum sebagai pengalaman belajar

Kategori pengertian kurikulum yang kedua adalah kurikulum

di anggap sebagai seluruh pengalaman belajar yg diperoleh oleh peserta didik terhadap tanggung jawab sebuah lembaga pendidikan tertentu. Pengalaman-pengalaman belajar itu bisa berupa mengkaji seluruh mata pelajaran, dan bisa juga pengalaman belajar lain yg dianggap bermanfaat bagi siswa.

3) Kurikulum sebagai rencana belajar

Kedua pengertian kurikulum diatas sama-sama memiliki keterbatasan sendiri di dalam proses penerapannya. Pada rumusan pertama, keterbatasan penerapannya terletak pada sempitnya cakupan. Pada rumusan kedua, keterbatasannya terletak pada ketidakfungsionalan konsep untuk diterapkan dalam konteks perencanaan. Rumusan pengertian kurikulum yang ketiga menyodorkan alternatif yang lebih rasional dan fungsional, sehingga ia dapat diterapkan dalam situasi praktis.³³

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, kompetensi dasar, materi standar dan hasil belajar yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar dan tujuan pendidikan

2. Konsep Kurikulum Merdeka

Merdeka Belajar merupakan inisiatif kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI)

³³Abdul Wafi, Konsep Dasar Kurikulum Pendidikan Agama Islam..., h.135

yang diprakarsai oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim. Bukan tanpa alasan Nadiem menentukan kebijakan belajar mandiri, itu karena studi *Program for International Student Assessment* (PISA) 2019 menunjukkan siswa Indonesia hanya menempati peringkat enam terendah dalam hasil penilaian dalam matematika dan literasi. Menyikapi hal tersebut, Nadiem membuat terobosan dalam menilai kemampuan minimum, termasuk survei literasi, numerasi, dan kepribadian.

Literasi tidak hanya mengukur kemampuan membaca, tetapi juga kemampuan menganalisis apa yang dibaca dan memahami konsep di baliknya. Untuk kemampuan numerasi, yang dinilai bukanlah matematika, melainkan penilaian terhadap kemampuan siswa dalam menerapkan konsep-konsep bilangan dalam kehidupan nyata. Selebihnya, survei karakter bukanlah ujian, melainkan melihat sejauh mana siswa mengamalkan nilai-nilai budi pekerti, agama, dan Pancasila.³⁴

Esensi kemerdekaan berpikir, menurut Nadiem, harus didahului oleh para guru sebelum mereka mengajarkannya pada peserta didik. Nadiem menyebut, dalam kompetensi guru di level apapun, tanpa ada proses penerjemahan dari kompetensi dasar dan kurikulum yang ada, maka tidak akan pernah ada pembelajaran yang terjadi. Sistem pengajaran juga akan berubah dari yang awalnya bernuansa di dalam kelas menjadi di luar kelas membentuk karakter peserta didik yang berani, mandiri,

³⁴Siti Mustaghafiroh, Konsep Merdeka Belajar Perspektif Aliran Progresivisme John Dewey, *Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran*, 3 (1), 2020, h. 145

cerdik dalam bergaul, beradab, sopan, berkompetensi, dan tidak hanya mengandalkan sistem ranking.

Konsep Merdeka Belajar ala Nadiem Makarim terdorong karena keinginannya menciptakan suasana belajar yang bahagia tanpa dibebani dengan pencapaian skor atau nilai tertentu.³⁵ Menurut Arifin dan Muslim, merdeka belajar memiliki empat pokok kebijakan,

- a) pertama adalah perubahan dalam mekanisme Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN). Hal ini dilandasi pada kekurangan dari penerapan kurikulum 2013 yang kurang mampu secara luas untuk melihat dan mengevaluasi pencapaian kompetensi pada pelajar dengan mekanisme USBN. Amanat Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 menyatakan bahwa kelulusan dalam penilaian ketercapaian standar kompetensi harus diberikan kepada lembaga pendidikan. Melihat problematika tersebut, perubahan mekanisme USBN dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang semula bersifat sentralistik menjadi berbasis sekolah.
- b) Kedua, perubahan bentuk ujian nasional (UN) yang semula berfokus pada penguasaan materi berubah menjadi pengarahannya pada hafalan dan mengurangi penalaran. Penilaian dalam ujian nasional juga dirubah dikarenakan memberikan beban yang terlalu berat. Perubahan ini juga kerap disebut dengan perubahan visioner dan ekstrim dikarenakan menghapus UN dan merubahnya menjadi survei karakter dan penilaian

³⁵Siti Mustaghafiroh, Konsep Merdeka Belajar Perspektif Aliran Progresivisme John Dewey ..., h. 146

kompetensi minimal, dengan aspek yang dinilai adalah aspek literasi, numerik, karakter dan sebagainya.

- c) Ketiga, kebebasan pendidik dalam melakukan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang semula bersifat holistik diubah menjadi terpusat kepada para pendidik. Dalam hal ini para pendidik diberi kebebasan secara mandiri dalam penyusunan RPP yang diwajibkan untuk betumpu pada tujuan kegiatan dan penilaian dengan satu halaman saja, atau yang biasa dikenal dengan RPP satu lembar.
- d) Keempat, diterapkannya kebijakan sistem zonasi pada penerimaan siswa baru. Hal ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas sekolah dan otonom daerah untuk mengelola sistem zonasi sesuai dengan kondisinya masing-masing. Perubahan ini juga ditujukan supaya tidak terjadi sentralisasi dan kesenjangan sosial pendidikan yang tinggi dalam memilih sekolah.

Merdeka Belajar merupakan sebuah konsep belajar yang berfokus pada pembelajaran bebas dan aktif yang berpusat pada pelajar (*student centered learning*), untuk memperoleh pengalaman langsung dari berbagai macam problematika sosial yang terjadi dalam masyarakat dan kehidupan sehari-hari. Konsep merdeka belajar menurut Susilawati dalam Zidni Ilman, dkk akan mampu diimplementasikan dengan baik apabila pelaku pendidikan dapat melihat jauh aspek filosofis sebagai landasan terbentuknya, karena sebuah konsep pendidikan dapat dikatakan sebagai aplikasi pemikiran filosofis. Hal ini dikarenakan bahwa filsafatlah yang

memberikan kerangka konseptual yang holistik tentang manusia dan Pendidikan.

Konsep Merdeka belajar ini merupakan suatu inovasi untuk menghasilkan pelajar yang inovatif, kreatif, unggul dan mampu mengembangkan potensi dirinya dalam bidang keilmuan yang sedang ditekuni. Membawa arah untuk mampu berkontribusi dengan baik dalam menuntut peningkatan ekonomi bagi peserta didik sehingga dapat belajar secara bebas. Hal ini dikarenakan pendidikan dipersiapkan untuk mampu mengantisipasi berbagai macam masalah sosial yang tengah berada dalam masyarakat.³⁶

Program Merdeka Belajar merupakan strategi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk membangun sumber daya manusia yang siap menghadapi revolusi industri keempat (industri 4.0). Siswa dan guru melihat Merdeka Belajar sebagai jembatan menuju sistem pendidikan masa depan yang lebih mengandalkan teknologi komunikasi untuk dikuasai. Dalam hal ini, guru dan siswa harus beradaptasi dengan pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi untuk mencapai tujuan pendidikan.³⁷ Melalui konsep Merdeka Belajar, menitikberatkan pada pembelajaran yang lebih mendalam di informasi

³⁶ Mira Marisa, "Curriculum Innovation ' Independent Learning ' In The Era Of Society 5 . 0 Email : Miramarisa97@gmail.Com" 5, no. 1 (2021): 66–78, <https://doi.org/10.36526/js.v3i2.e-ISSN>.

³⁷ Yuhastina et al., "Sociology Teachers ' Opportunities and Challenges in Facing ' Merdeka Belajar ' Curriculum in the Fourth Industrial Revolution and Danang Purwanto," no. October (2021), <https://doi.org/10.33019/society.v8i2.234>.

yang utuh untuk memprediksi implikasinya baik lingkungan masyarakat yang lebih nyata.³⁸

3. Orientasi P5 Kurikulum Merdeka

Seiring dengan perkembangan industri 4.0 yang kemudian memunculkan *education* 4.0, pendidikan berbasis luaran atau dikenal sebagai *Outcome-Based Education* (OBE) saat ini menjadi kebutuhan utama dalam pengelolaan pendidikan. Salah satu orientasi kurikulum merdeka belajar adalah OBE yakni proses pendidikan yang berfokus pada pencapaian hasil konkret yang ditentukan (pengetahuan yang berorientasi pada hasil, kemampuan dan perilaku). OBE adalah proses yang melibatkan penataan kurikulum, penilaian, dan praktik pelaporan dalam pendidikan yang mencerminkan pencapaian pembelajaran dan penguasaan tingkat tinggi daripada akumulasi kredit.

Terdapat lima prinsip OBE, yakni (1) fokus pada CP, (2) rancangan kurikulum menyeluruh, (3) memfasilitasi kesempatan belajar, (4) sesuai dengan pembelajaran konstruktif, dan (5) menggunakan siklus *Plan-Do-Check-Action* (PDCA). CP harus disusun berdasarkan visi dan misi lembaga sesuai dengan Profil Lulusan dengan selalu menyesuaikan pada para pemangku kepentingan (internal dan eksternal). CP yang sudah sesuai menjadi tumpuan dalam merumuskan CPL, CPMK, dan sub-CPMK.

³⁸Indra Maipita, Muhammad Bukhori Dalimunthe, and Gaffar Hafiz Sagala, "The Development Structure of the Merdeka Belajar Curriculum in the Industrial Revolution Era" 163, no. ICoSIEBE 2020 (2021): 145–151.

Rancangan kurikulum harus ditinjau secara menyeluruh: CP, asesmen, dan pusat pembelajaran agar saling bersesuaian.³⁹

Sistem pembelajaran yang digunakan dalam Kurikulum Merdeka didasarkan pada pengembangan profil peserta didik agar mempunyai jiwa serta nilai-nilai yang terkandung pada sila Pancasila dalam kehidupannya.⁴⁰ Profil pelajar Pancasila dirancang untuk menjawab satu pertanyaan besar, yakni peserta didik dengan profil (kompetensi) seperti apa yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia.

Enam fase yang ingin dicapai P5 dalam pendidikan karakter profil pelajar Pancasila, yakni: Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, Bergotong-royong, Mandiri., Bernalar kritis, serta Kreatif. Adapun prinsip-prinsip proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah sebagai berikut:

- a) Holistik, memandang sesuatu secara utuh dan menyeluruh, tidak parsial atau terpisah-pisah. Dalam konteks perancangan Proyek Penguatan profil pelajar Pancasila, kerangka berpikir holistik mendorong kita untuk menelaah sebuah tema secara utuh dan melihat keterhubungan dari berbagai hal untuk memahami sebuah isu secara mendalam. Oleh karenanya, setiap tema proyek profil yang dijalankan bukan merupakan sebuah wadah tematik yang menghimpun beragam

³⁹Maman Suryaman, Orientasi Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar, In *Seminar Nasional Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, 2020, h. 21

⁴⁰Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kemendikristek, *Panduan Pengembangan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila...*, h. 700

mata pelajaran, namun lebih kepada wadah untuk meleburkan beragam perspektif dan konten pengetahuan secara terpadu.

- b) Kontekstual, Prinsip kontekstual berkaitan dengan upaya mendasarkan kegiatan pembelajaran pada pengalaman nyata yang dihadapi dalam keseharian. Prinsip ini mendorong pendidik dan peserta didik untuk dapat menjadikan lingkungan sekitar dan realitas kehidupan sehari-hari sebagai bahan utama pembelajaran. Oleh karenanya, satuan pendidikan sebagai penyelenggara kegiatan proyek profil harus membuka ruang dan kesempatan bagi peserta didik untuk dapat mengeksplorasi berbagai hal di luar lingkup satuan pendidikan.

Tema-tema proyek profil yang disajikan sebisa mungkin dapat menyentuh dan menjawab persoalan lokal yang terjadi di daerah masing-masing. Dengan mendasarkan proyek profil pada pengalaman dan pemecahan masalah nyata yang dihadapi dalam Memahami Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila antar komponen dalam pelaksanaan projekprofil, seperti peserta didik, pendidik, satuan pendidikan, masyarakat, dan realitas kehidupan sehari-hari.

- c) Prinsip berpusat pada peserta didik, berkaitan dengan skema pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk menjadi subjek pembelajaran yang aktif mengelola proses belajarnya secara mandiri, termasuk memiliki kesempatan memilih dan mengusulkan topic proyek profil sesuai minatnya. Pendidik diharapkan dapat mengurangi peran sebagai aktor utama kegiatan belajar mengajar yang menjelaskan

banyak materi dan memberikan banyak instruksi. Sebaliknya, pendidik sebaiknya menjadi fasilitator pembelajaran yang memberikan banyak kesempatan bagi peserta didik untuk mengeksplorasi berbagai hal atas dorongannya sendiri sesuai dengan kondisi dan kemampuannya.

- d) Eksploratif, Prinsip eksploratif berkaitan dengan semangat untuk membuka ruang yang lebar bagi proses pengembangan diri dan inkuiri, baik terstruktur maupun bebas. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila tidak berada dalam struktur intrakurikuler yang terkait dengan berbagai skema formal pengaturan mata peserta didikan. Oleh karenanya proyek profil ini memiliki area eksplorasi yang luas dari segi jangkauan materi peserta didikan, alokasi waktu, dan penyesuaian dengan tujuan pembelajaran. Namun demikian, diharapkan pada perencanaan dan pelaksanaannya, pendidik tetap dapat merancang kegiatan proyek profil secara sistematis dan terstruktur agar dapat memudahkan pelaksanaannya.

Prinsip pembelajaran dapat mengasah kemampuan peserta didik dalam memunculkan inisiatif serta meningkatkan daya untuk menentukan pilihan dan memecahkan masalah yang dihadapinya. eksploratif juga diharapkan dapat mendorong peran proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk menggenapkan dan menguatkan kemampuan yang sudah peserta didik dapatkan dalam peserta didikan intrakurikuler.

D. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam tulisan ini dapat divisualisasikan ke bentuk skema sebagai berikut:

